



Jurnal Keislaman

p-ISSN : [2089-7413](#) and e-ISSN : [2722-7804](#)

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293

Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab

Sehan Rifky¹

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

sehanrifky@gmail.com¹

Masduki Duryat²

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

masdukiduryat@syekhnurjati.ac.id²

Savitri Tungga Saddami³

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

tunggasaddamisavitri@gmail.com³

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3897>

Abstract

This paper discusses descriptively the Leadership Management and Political Policies of Umar bin Khattab in managing a government. Umar's leadership lasted for more or less 10 years, even though the government during Umar's time was really growing rapidly because it was supported by political conditions that tended to be stable and only continued the leadership of Abu Bakar Ash Shidiq, therefore Caliph Umar could become a manager with government institutions formed by Umar, as well as policies that separate the interests of the political elite from the interests of society. Umar was also known for his phenomenal policy, namely dividing several regions of the country into provinces led by governors and continuously expanding to various parts of the world from the Arabian Peninsula, Palestine, Syria, Iraq, Egypt, Persia and Rome, so that at that time Islam became victorious and strong with aqidah taught based on the Al-Quran and Sunnah. His knowledge and innovation in dealing with poverty and being able to maximize the assets and resources of the state owned so that the community at that time was safe, prosperous and peaceful, Umar's leadership management made him a leader who was loved by his people. Umar also has a unique leadership management, namely "blusukan" to the village without strict supervision. Like the number one person in Indonesia, namely President Jokowi, who implemented this "blusukan" strategy in his leadership, it managed to captivate the hearts of the people and succeeded in making him president for 2 terms..

Keywords: Leadership Management, Political Policy, Umar Bin Khattab, Islamic Politics.

Abstrak

Tulisan ini membahas secara deskriptif tentang Manajemen Kepemimpinan dan Kebijakan Politik Umar bin Khattab dalam mengatur sebuah pemerintahan. Kepemimpinan Umar kurang lebih berlangsung selama 10 tahun, walaupun demikian pemerintahan pada zaman Umar sungguh sangat berkembang pesat karena didukung dengan kondisi politik yang cenderung stabil dan tinggal meneruskan kepemimpinan dari Abu Bakar Ash Shidiq maka dari itu Khalifah Umar dapat menjadi manager dengan adanya lembaga-lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh Umar, serta kebijakan-kebijakan yang memisahkan kepentingan elite politik dengan kepentingan masyarakat. Umar juga dikenal dengan kebijakannya yang fenomenal yaitu membagi beberapa wilayah negara menjadi provinsi yang dipimpin oleh gubernur serta terus menerus melakukan ekspansi ke berbagai belahan dunia dari mulai semenanjung Arab, Palestina, Syria, Irak, Mesir, Persia, dan Romawi, sehingga pada saat itu Islam menjadi berjaya serta kokoh dengan aqidah yang diajarkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pengetahuan dan Inovasinya dalam menangani

kemiskinan serta dapat memaksimalkan harta dan sumberdaya negara yang dimiliki sehingga menjadikan masyarakat kala itu menjadi aman, makmur dan tentram, manajemen kepemimpinan yang dimiliki Umar menjadikannya sebagai pemimpin yang dicintai rakyatnya. Umar juga memiliki manajemen kepemimpinan yang khas yakni "blusukan" ke perkampungan tanpa pengawasan yang ketat. Seperti halnya orang nomor satu di Indonesia yaitu Presiden Jokowi yang menerapkan strategi "blusukan" ini dalam kepemimpinannya, itu berhasil memikat hati rakyat serta sukses menjadikannya presiden selama 2 periode.

Kata Kunci: Manajemen Kepemimpinan, Kebijakan Politik, Umar Bin Khattab, Politik Islam.

Pendahuluan

Dalam Islam kepemimpinan berlandaskan pada Al-Quran, As-sunnah, dan ijtihad. Adapun karakter pemimpin dalam Islam yaitu seseorang yang memiliki karakter kenabian diantaranya: *sidiq, amanah, tabligh, dan fatonah*. Selain dari karakter kenabian seorang pemimpin juga harus memiliki aqidah yang lurus, berakhlakul karimah, memiliki kecerdasan dan berwawasan luas serta memiliki kemampuan manajerial (Formanto 2020).

Manajemen kepemimpinan yang diamalkan oleh Umar bin Khattab, salah satu khalifah Rasyidin, menyiratkan prinsip-prinsip yang tetap relevan untuk dipakai pada zaman modern. Salah satu pilar utama adalah keadilan sosial yang menjadi landasan bagi kebijakan distribusi kekayaan dan sumber daya yang merata. Umar secara aktif terlibat dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dengan mengadopsi pendekatan redistribusi, mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Prinsip ini mencerminkan pentingnya keadilan sosial dalam manajemen modern, di mana perusahaan dan organisasi diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan serta meminimalisir adanya korupsi pada kalangan elite politik.

Kepemimpinan partisipatif yang diterapkan oleh Umar juga memiliki relevansi yang patut dijadikan pedoman untuk diaplikasikan pada saat ini. Ia mendorong interaksi langsung dengan rakyat dan mendengarkan pandangan mereka sebelum membuat keputusan penting. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya melibatkan stakeholder dan tim dalam proses pengambilan keputusan, sesuatu yang menjadi inti manajemen partisipatif modern.

Kemampuan Umar dalam mengelola krisis dan berinovasi juga menarik perhatian. Dalam situasi sulit, ia mampu mengambil tindakan cepat dan berani serta menemukan solusi kreatif untuk mengatasi masalah. Ini mengingatkan kita pada pentingnya manajemen perubahan dan kemampuan beradaptasi dalam dunia bisnis yang penuh tantangan saat ini.

Selain itu, pendekatan transparansi dan pertanggungjawaban Umar dalam pemerintahan juga memiliki paralel dalam manajemen modern. Keterbukaan dalam administrasi, kemampuan untuk mengoreksi kesalahan, serta tanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan adalah prinsip-prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan organisasi, bisnis, dan pemerintahan pada zaman sekarang. Kesemuanya ini menunjukkan bagaimana manajemen kepemimpinan Umar bin Khattab mengandung prinsip-prinsip yang relevan dan dapat memberikan inspirasi dalam berbagai aspek termasuk bidang politik.

Politik dalam bahasa Arab disebut *siyasah* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Fiqh yang membahas masalah itu disebut *fiqh siyasah* (Imtihana 2009).

Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab – Sehan Rifky, Masduki Duryat, Savitri Tungga Saddami

Secara hakikat, politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat (Nambo and Puluwuluwa 2005).

Yusuf Al-Qardhawy, mendefinisikan politik sebagai menjadikan syari'at sebagai pangkal tolak, kembali dan bersandar kepadanya, mengaplikasikannya di muka bumi, menancapkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsipnya di tengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan sasarannya, sistem dan jalannya (Al Qaradhawi 2004).

Politik Islam juga dapat diartikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Karena Islam adalah meliputi akidah dan syariat, *ad Diin wad Daulah*. Hal ini tentu sangat berbeda dengan agama-agama lain, seperti Kristen, Yahudi, Budha, Hindu. Sebab agama-agama tersebut hanya memuat tuntunan-tuntunan moral saja, tidak mengajarkan sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem pemerintahan dan sistem sosial. Sehingga wajar jika kemudian pelibatan agama tersebut dalam kehidupan politik dan pemerintahan akan menyebabkan "pemeriksaan" dan "penodaan" terhadap agama. Karena pada dasarnya yang membuat aturan tersebut bukanlah Tuhan, tetapi akal dan nafsu manusia. Sementara Islam yang bersifat syamil dan kamil, yaitu bersifat menyeluruh, tidak memiliki cacat sedikit pun, mengatur seluruh sisi kehidupan manusia dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Dari urusan yang paling kecil seperti makan, tidur dan lain-lain sampai yang paling besar, seperti politik, hukum, ekonomi dan lain-lain (Hamzani and Aravik 2001).

Dewasa ini secara garis besar terdapat dua spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda, sekalipun kedua spektrum tersebut sama-sama mengakui akan urgensi prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan (Effendy 1988).

Pertama, pendapat yang memosisikan sistem politik modern sebagai sesuatu yang berlawanan dengan pemikiran politik Islam. Atas pandangan demikian, golongan ini berpendapat bahwa satu-satu cara menghadapi konsep politik Barat adalah dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara atau menjadikan syari'ah sebagai konstitusi negara. Sikap konfrontatif terhadap ide-ide politik Barat semakin tampak dalam terma-terma yang dikemukakan, misalnya konsep nation-state dianggap bertentangan dengan konsep ummat, konsep demokrasi dipahami secara berbeda dengan aplikasi al-syûrâ. Karena secara umum sistem politik yang dianut oleh golongan ini masih mengedepankan "hukum Tuhan", atau masih mengharap secara mendalam campur tangan Tuhan dalam urusan-urusan kenegaraan, maka sistem politik yang dianut oleh golongan ini disebut juga dengan sistem kedaulatan Tuhan.

Spektrum kedua, adalah pandangan yang akomodatif terhadap sistem politik Barat-modern. Argumen yang dijadikan sebagai dasar pandangan ini adalah dalam Islam tidak terdapat pola baku tentang sistem politik yang harus dianut oleh umat Islam. Bahkan menurut golongan ini istilah negara (*al-dawlah*) tidak ditemukan di dalam Alquran. Sekalipun terdapat ungkapan-ungkapan di dalam Alquran yang seolah olah maknanya merujuk kepada kekuasaan politik, akan tetapi sifatnya incidental dan tidak berpengaruh sama sekali terhadap teori politik. Dengan ungkapan lain, bagi golongan ini, Alquran bukanlah kitab yang berisikan ilmu-politik.

Hasil dan Pembahasan

1. Manajemen Kepemimpinan Umar Bin Khattab (13-25 H/634-644M)

Kepemimpinan Umar dalam memerintah negara Madinah seperti digambarkan oleh Syed Mahmudunnasir telah menyulap wilayah negara Islam yang masih bayi menjadi kekaisaran yang besar dan kekuatan yang paling besar di dunia pada masa itu (Mahmudunnasir 1981). Dalam 10 tahun kepemimpinannya wilayah yang ditaklukkan meliputi, Irak, Iran, Syria, Palestina, Romawi dan Mesir. Kepemimpinannya memperlihatkan ciri yang menonjol dari eranya adalah Umar sosok pemimpin yang memiliki visi ke depan yang jelas. Hal ini terlihat dari langkah-langkah ekspansi yang kemudian menyulap negara Madinah yang lokal menjadi bersifat imperium global. Demikian juga ia telah menjadikan Madinah dari corak kepemimpinan tradisional Arab yang tekstual kesukuan, kemudian mengkonsolidasikannya menjadi menjadi bangsa Arab yang kuat dan ber peradaban. Dalam mewujudkan misinya itu ia melakukan pembersihan terhadap kelompok-kelompok kepentingan yang dianggap dapat mengganggu. generasi sekarang. Terobosan-terobosan tersebut antara lain, peletak dasar administrasi pemerintahan Islam, memperkenalkan sistem sensus, memperkenalkan sistem jaminan pensiun, memperkenalkan kalender hijriah, membentuk dewan keuangan negara, membangun sistem irigasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan lain-lain.

Khalifah Umar bin Khattab di dalam sejarah Islam tercatat sebagai salah seorang administrator yang terampil dan pandang mengelola administrasi pemerintahan dengan perangkat mekanisme yang makin disempurnakan. Struktur pemerintahan Madinah diatur oleh Umar sedemikian rupa baiknya, sehingga lebih mencerminkan karakteristik politik Islam. Salah satu mekanisme yang paling penting ialah pembentukan majelis permusyawaratan yang anggota-anggotanya terdiri dari kelompok Muhajirin dan Anshar. Kelompok Anshar terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Tercatat sebagai anggota pada majelis itu antara lain Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Mu"az bin Jabal, Ubay bin Ka"ab, Zaid bin Tsabit, dan lain-lain. Tempat persidangan majelis adalah di Masjid Madinah (Azhary 2007).

Bahkan terdapat pula petugas pengawas yang melaporkan kepadanya tentang kemungkinan- kemungkinan terjadinya penyelewengan baik yang dilakukan oleh pejabat sipil maupun pejabat militer. Setiap kasus penyelewengan beliau selesaikan

Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab – Sehan Rifky, Masduki Duryat, Savitri Tungga Saddami

secara hukum. Untuk hal ini tiada seorang pun dikucilkan (Azhary 2007). Prinsip persamaan ini juga terlihat dalam suatu surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari ketika itu menjabat sebagai hakim. Persamakanlah rakyat di hadapanmu, di persidangan-persidangan dalam mahkamahmu agar orang yang mempunyai kedudukan tinggi tidak mengharapkan sesuatu (yang buruk) dari padamu sedang orang-orang yang lemah tidak putus asa mengharapkan keadilanmu (Azhary 2007).

Prinsip kesejahteraan pun sangat diterapkan Umar bin Khattab kepada para pegawai negara dengan cara memberikan gaji atau perhiasan yang cukup. Dengan cara ini, kemungkinan penyelewengan-penyelewengan terhadap kekayaan negara dapat dihindari (Azhary 2007). Umar membagi kekuasaan Islam, yang berpusat di Madinah, ke dalam beberapa provinsi, yaitu Mekkah, Madinah, Syam, Jazirah, Basra, Kufah, Mesir, dan Palestina. Langkah membagi wilayah kekuasaan Islam yang luas tersebut merupakan sesuatu yang tepat dalam memimpin wilayahnya. Kawasan yang sudah demikian luas itu tidak mungkin lagi diatur langsung dari Madinah. Tugas-tugas pemerintahan di kawasan itu dipercayakan kepada para gubernur. Kedudukan gubernur merupakan wakil khalifah di Madinah.

Untuk memelihara keutuhan negara, di mana diperlukan kekuatan militer yang tangguh dan berkelanjutan, Umar mulai membentuk diwan tentara reguler dengan sistem imbalan oleh negara dari baitul mal. Diwan tersebut dikenal dengan sebutan Diwan Umar, yaitu suatu daftar orang-orang dalam laskar yang diatur menurut suku masing-masing. Diwan itu juga memberikan penetapan jumlah gaji yang harus diterima. Bahkan diwan tersebut juga menjelaskan pengelompokan jumlah gaji itu berdasarkan pada waktu mereka memeluk Islam.

Umar juga membentuk dewan-dewan dalam pemerintahan, mendirikan baitul mal, membuat mata uang emas, membentuk korps tentara untuk menjaga tapal batas, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, mengatur perjalanan pos, menciptakan tahun hijrah, dan mengontrol hisbah. Hisbah merupakan pengawasan terhadap pasar, pengontrolan terhadap timbangan dan takaran, pengawasan terhadap tata tertib kesusilaan, sampai pengawasan terhadap kebersihan jalan.

Satu hal yang unik belum pernah dilakukan oleh penguasa di mana pun, Khalifah Umar bin Khattab pada setiap malam melakukan perjalanan keliling kampung untuk

menyelidiki dan mengetahui bagaimana kehidupan rakyat. Beliau langsung pergi seorang diri secara *incognito* untuk melihat bagaimana keadaan rakyatnya. Suatu ketika dalam suatu perjalanan, beliau menyaksikan seorang ibu sedang berebus sesuatu. Sementara itu anaknya merintih kelaparan. Ketika beliau mengetahui bahwa yang direbus oleh si ibu itu adalah air dengan maksud untuk menghibur si anak yang kelaparan, maka beliau segera berfikir bahwa beliaulah yang bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Umar sebagai khalifah merasa hal itu tidak patut terjadi, kalau saja ia tahu sebelumnya. Maka pada saat itu juga ia pergi meninggalkan tempat itu dan segera kembali dengan memanggul sejumlah gandum dan lain-lain untuk diberikan kepada si ibu tadi untuk segera dimasak sebagai makan malam mereka. Begitulah cara Khalifah Umar bin Khattab melaksanakan prinsip kesejahteraan (Azahary 2007).

Sebagai seorang Manajer handal Khalifah Umar ibn al-Khattab membuat Lembaga-lembaga, yang mendapatkan distribusi dana dari *Bait al-Mal* (Firdaus 2013):

- a. Lembaga Pelayanan Militer. Lembaga ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
- b. Lembaga Kehakiman dan Eksekutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ini ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktik suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan kalau pun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.
- c. Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Islam. Lembaga ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
- d. Lembaga Jaminan Sosial. Lembaga ini menyimpan daftar bantuan untuk fakir dan miskin. tujuan dari lembaga ini adalah agar tidak seorangpun di negeri ini terabaikan kebutuhan hidupnya. semua orang yang sakit, usia lanjut, cacat, yatim piatu, janda atau oleh karena sebab lain sehingga tidak mampu memperoleh penghidupan sendiri diberi bantuan keuangan secara tahunan dari *Bait al-Mal*.

Lembaga-lembaga yang muncul tidak hanya terkait dengan badan yang memiliki fungsi sebagai eksekutif, melainkan pula lembaga yang mengawali pelayanan publik

dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik masyarakat di masa pemerintahannya. Lembaga-lembaga tersebut adalah (Al-Qudsy and Ab Rahman 2011):

- a. Hisbah, lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap keberlakuan dan penerapan hukum di pasar atau area perdagangan, dengan dikepalai oleh muhasib.
- b. Lembaga pengaduan yang diperuntukan meberikan laporan-laporan terkait aduan-aduan masyarakat atas sesuatu hal yang merugikan masyarakat itu sendiri.

Umar ibn al-Khattab adalah sosok pemimpin yang berhasil membawa masyarakat islam menuju keberhasilan dalam membangun pondasi keagamaan yang kuat. Sosok pemimpin yang taat, demokratis, jujur, adil , dan peduli terhadap rakyatnya. Gaya kepemimpinan dan pemikiran Umar ibn al-Khattab yang handal menjadikan beliau sebagai salah satu pemimpin yang hebat dimasanya. Umar adalah khalifah yang sangat mementingkan kerja dan produktifitas tinggi, beliau menjadikan kerja sebagai bentuk ibadah yang tertinggi. Kepemimpinan Umar ibn al-Khattab selama 10 tahun sebagai Amirulmukminin, peranan umar sebagai tidak hanya dikenal sebagai kepala negara namun juga sebagai pemimpin umat (Pratama and Sujati 2018).

Hanya saja, akhir hidup Umar sangat tragis pada hari Rabu bulan Dzulhijah tahun 23 H Umar bin Khattab wafat, lantaran terbunuh oleh seorang budak dari Persia bernama Abu Lu'luah. Tragedi ini terjadi sewaktu penduduk tengah berkumpul untuk menjalankan shalat subuh, Abu Lu'luah masuk ke tengah-tengah mereka. Ketika Khalifah Umar memasuki masjid, ia menyerbu dan menikamnya dengan sebilah pisau tajam dengan cepat melarikan diri. Pembunuhan tersebut diduga bermotif dendam akibat penaklukan atas Persia yang dilakukan pasukan Islam pada masa Umar. Umar memerintah paling lama dibandingkan tiga khalifah lain, yaitu sepuluh tahun enam bulan (Hamzani and Aravik 2001).

2. Kebijakan Politik Kenegaraan Umar Ibn Khattab

Umar merupakan pemimpin yang selalu membuat kebijakan revolusioner pada masa pemerintahannya yang tidak pernah ada sebelumnya. Pemimpin yang pertama kali membuat penanggalan hijriyah, mengumpulkan masyarakat untuk solat tarawih berjamaah. Selain itu Umar juga merupakan pemimpin yang selalu melakukan dan mencapai hal baru yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya

(Setiyowati et al. 2021). Di antara kebijakan-kebijakan politik kenegaraan yang dilakukan oleh Umar Ibnu Khattab antara lain:

a. Ekspansi ke Persia

Setelah Umar menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, Umar meneruskan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya sudah ditempuh pada masa Abu Bakar. Salah satu kebijakan tersebut adalah peperangan melawan memperebutkan wilayah Hira, salah satu kawasan Sasanid Persia. Jadi, jika Abu Bakar fokus pada kebijakan-kebijakan internal karena memang kondisinya pada masa itu demikian genting, maka Umar melakukan kebijakan-kebijakan keluar atau ekspansi. Ekspansi yang dilakukan Umar adalah terutama perlawanan atau peperangan terhadap Persia, seperti tampak pada perang Namarraq, al-Jasr (jembatan), Qadisiya, dan Jalula. Dengan dikuasainya wilayah-wilayah tersebut dari Persia, maka seluruh wilayah-wilayah tersebut menjadi wilayah kekuasaan negara Islam.

Ada sejumlah alasan mengapa umat Islam terlibat konflik dan akhirnya mengadakan Peperangan atau penaklukan terhadap wilayah-wilayah Sasanid Persia. Pertama, adalah alasan stabilitas keamanan. Ketika negara Islam Madinah baru tumbuh di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad bangsa Persia menghina utusan yang dikirim nabi Muhammad ke Persia. Rajanya waktu itu bernama Khusroes II. Kemarahan umat Islam ini semakin bertambah, ketika ternyata bangsa Persia terbukti menghasut bahkan memberikan bantuan militer dalam melawan negara Madinah. Oleh sebab itu sangat beralasan jika kemudian negara Madinah ini melakukan penaklukan terhadap kekuasaan Persia. Apalagi memang secara geografis wilayah-wilayah tersebut sangat strategis dalam konteks hubungan dengan suku-suku Arab lainnya. Kedua, adalah alasan ekonomi. Kawasan Persia, terutama Irak adalah wilayah yang sangat subur, karena diapit oleh dua sungai, yakni Tigris dan Euphrat. Posisi demikian menyebabkan daerah Irak adalah daerah yang makmur yang sangat potensial bagi sumber pendapatan negara (Ali 2000).

b. Ekspansi ke Bizantium

Byzantine adalah salah satu wilayah kekuasaan Romawi di Timur yang meliputi Syria, Palestina dan Mesir. Kaisarnya bernama Heracklius. Hubungan antara negara Madinah pimpinan nabi Muhammad dan Bizantium ini awalnya cukup bagus, yakni dengan penerimaan yang baik atas delegasi yang dikirim nabi

Muhammad ke daerah ini oleh Heraclius. Akan tetapi di Syria, delegasi yang dikirim Nabi Muhammad ke daerah ini dibunuh. Sejak masa inilah hubungan keduanya yakni antara Bizantium dan negara Madinah cenderung memburuk. Situasi ini diperburuk dengan keterlibatan Heraclius dalam menyulut suku- suku Badui di daerah perbatasan di Syria dan Palestina untuk melawan kekuasaan negara Madinah pada masa Abu Bakar. Jadi hal inilah yang menyulut permusuhan antara Bizantium dan negara Madinah, yakni perlakuan yang tidak baik sebagai negara tetangga, dan ancaman stabilitas keamanan. Faktor selanjutnya adalah alasan ekonomi. kawasan-kawasan yang dikuasai Bizantium, seperti Syria, Mesir, dan Palestina adalah daerah yang sangat subur. Keadaan demikian memberi andil yang sangat besar bagi kemakmuran masyarakatnya. Sementara di sisi lain di Arabia, wilayah kekuasaan Islam adalah wilayah yang sebagian besar adalah gurun. Kesuburan dan kemakmuran wilayah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penaklukan oleh negara Madinah (Katimin 2017).

Meskipun demikian hubungan antara pemerintahan Madinah dengan Bizantium tidak selamanya dalam keadaan konflik. Apalagi ketika Jerusalem berada di bawah taklukan negara Madinah, para penguasa Islam berusaha untuk memperbaiki kehidupan rakyat, melakukannya dengan adil dan penuh tanggung jawab.

c. Sistem Pemerintahan Umar Ibnu Khattab

Kebijakan Umar yang dianggap monumental selain ekspansi adalah mendirikan sebuah sistem administrasi pemerintahan. Umar membagi wilayah negara menjadi sejumlah Propinsi. Masing-masing propinsi ini diketuai oleh seorang gubernur (wali atau amîr), yakni: Gubernur Makkah, Madinah, Jazirah, Basrah, Mesir, dan Palestina. Seorang penguasa propinsi (wali) juga seorang panglima militer sekaligus sebagai imam agama. Mereka bertanggungjawab langsung kepada khalifah. Masing-masing propinsi terdiri dari distrik-distrik (Kabupaten) yang dikepalai oleh seorang *'amil*.

Penguasaan Imperium Persia dan Imperium Romawi menjadi puncak dari keberhasilan Umar ibn al-Khattab dalam memimpin Bangsa Arab, yang terpisah jauh dengan pengaruh dari kedua imperium tersebut sejak Nabi Muhammad saw

dideklarasikan sebagai khatam al-Anbiya. Luas wilayah yang ditaklukan oleh Umar ibn al-Khattab adalah 1.500.000 km², dengan rincian sebagai berikut (Al-Azami, n.d.):

- 1) Yarmuk atau wacusaarrnuk atau Wacusa, 5 Rajab, 13 H. (Sept. 634 M).
- 2) Pertempuran Qadisiyah, Ramadan, 14 H. (Nov. 635 M).
- 3) Ba'albak, 25 Rabl' I, 15 H. (636 M.).
- 4) Hims and Qjnnasrm, ditaklukan pada 15 H. (636 M).
- 5) Palestine and Quds (Jerusalem) in Rabl' II, 16 H. (637 M).
- 6) Madian, 15-16 H. (636-637 M).
- 7) Jazrra (Ruha, Raqqa, Nasibain, Harran, Mardien), mayoritas didiami oleh kaum Nasrani pada 18-20 H. (639-640 M).
- 8) Persia: Nehavand, 19-20 H. (640 M).
- 9) Mesir (tidak termasuk Alexandria) 20 H. (640 M).
- 10) Alexandria, 21 H. (641 M).
- 11) Barqa (Libya), 22 H. (642 M).
- 12) Tripoli (Libya), 23 H. (643 M).

Pengadilan merupakan kebijakan lainnya yang muncul pada masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab. Kebijakan itu berupa *ar-Risalah al-Qadha'* yang isinya mengandung beberapa prinsip hukum yang mengacu kepada prinsip-prinsip peradilan, seperti tugas hakim dan lain sebagainya. *ar-Risalah al-Qadha'* membuktikan bahwa Islam meninggalkan peradaban yang tinggi nilainya dan membuktikan pula bahwa intelektual Muslim mempunyai pemikiran yang mengarah ke masa depan (Ramlah 2011).

Umar juga mendirikan majelis Syuro/penasehat (MPR). Selain itu ia juga mendirikan suatu lembaga keuangan yang disebut dengan "Diwan". Diwan ini ada dari tingkat pusat hingga daerah untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Pendapatan negara pada masa Umar ini adalah: Zakat, *Jizyah*, *Kharaj*, *Ghanimah*, dan *Fay'*. Selain itu khalifah Umar juga menetapkan sumber pendapatan negara dari *al-Ustyr* (1/10) yang dipungut dari tanah perkebunan yang luas, pajak perniagaan dari para saudagar non uslim, dan zakat kuda.

Umar bin Khatthab sebagai khalifah kedua sukses dalam mengatur pemerintahan dan ekonomi negara. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa

***Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab – Sehan Rifky,
Masduki Duryat, Savitri Tungga Saddami***

Umar bin Khatthab telah menunjukkan kepada dunia bahwa ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah tidak menghalangi daya kreatif dan inovasi seorang pemimpin tertinggi sebuah negara dalam mewujudkan negara yang damai dan makmur. Kebijakan fiskal yang diterapkan Umar bin Khattab yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat antara lain mendirikan Baitul Mal yang berfungsi untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan Negara, mendirikan lembaga al hisbah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan di pasar, dan mendirikan lembaga-lembaga lain yang dapat menunjang perekonomian yang stabil sehingga umat sejahtera (Arfah and Jamilah 2021).

Sumber pendapatan negara tersebut selain digunakan untuk kepentingan umum, juga digunakan untuk masyarakat kecil, untuk keluarga, dan kerabat nabi, serta kesejahteraan pasukan. Dengan kata lain semua warga negara laki-laki dan perempuan seluruhnya mendapat santunan dari keuangan negara dan semuanya itu tercatat di dalam catatan Dewan Keuangan. Porsi terbesar dari dana santunan tersebut adalah para janda dan keluarga dekat nabi yang masing-masing menerima 10.000 dirham, pejuang muslim yang turut dalam perang Badar 5000 dirham, yang turut dalam perang Uhud sebesar 4000 dirham, dan 3000 dirham bagi mualaf yang memeluk Islam sebelum periode penaklukan Makkah. Dana pensiun tersebut diberikan setiap tahun. Sementara pasukan Islam (tentara) diberi tunjangan 500 – 600 dirham/bulan (Ali 2000). Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Umar adalah peletak sistem administrasi pemerintahan Islam, pendiri lembaga syura (DPR), dan memulai sistem pensiun bagi warga Madinah (Katimin 2017).

Umar yang berkuasa selama lebih kurang hanya 10 tahun, syarat dengan pembaharuan-pembaharuan yang dilakukannya untuk kemakmuran rakyat. Begitupun, masih terdapat juga pihak-pihak yang tidak senang dengan Umar. Di antara mereka inilah yang akhirnya berhasil membunuh Umar, yakni Abu Lukluk pada tahun 23 H / 643 M. Dalam literatur lain (Mahmudunnasir 1981) disebut bahwa ia mati di tangan Feroz seorang budak dari bangsa Persia. Feroz datang kepada Umar untuk mengadukan nasib yang menimpanya, yakni beban pajak yang sangat berat dari majikannya. Keesokan harinya ketika umat Islam hendak

salat di masjid Nabawi, Feroz berhasil menyusup. Baru saja Umar memulai shalatnya Feroz tiba-tiba menikam dari belakang. Akhirnya Umarpun tewas dengan sangat menggenaskan. Menurut Amir Ali sebagaimana dikutip oleh K. Ali, kematian Umar merupakan duka besar bagi umat Islam. Umar memang berwatak keras dalam memerintah, tetapi sangat bijaksana dalam memimpin masyarakat Arab Madinah yang cenderung susah diatur. Sosok Umar seperti benteng yang kokoh yang melindungi rakyatnya dari setiap bahaya yang mengancam. Kematian Umar ini merupakan pembunuhan politik pertama dalam sejarah Islam (Ali 2000).

Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi rakyatnya karena perhatiandan tanggung jawabnya yang sangat luar biasa padarakyatnya. Salah satu kebiasaannya adalah melakukan pengawasan langsung dan sendirian berkeliling kota mengawasi kehidupan rakyatnya (Marwa 2018).

Generasi mendatang dapat memetik ibrah dari kepribadian dan kepemimpinan Umar dalam memajukan warga negara Madinah seperti: visi yang jelas, ketegasan, kejujuran, keadilan, kesederhanaan, inovatif atau seringkali melakukan pembaruan-pembaruan atau terobosan-terobosan, keberpihakan terhadap rakyat kecil, turun langsung kekampung kampung untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan penghargaan terhadap HAM. Umar memang berwatak keras, tapi sangat lembut terhadap rakyatnya. Umar memimpin tidak hanya dengan akal fikiran, tapi juga dengan hati sanubari yang paling dalam karena didikan langsung dari Rasul SAW. Tipe pemimpin seperti Umar inilah yang diperlukan oleh umat Islam yang sedang mengalami sejumlah persoalan kebangsaan, seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta tindak penyelewengan (Korupsi) yang merajalela oleh hampir semua lapisan masyarakat dan penguasa.

Senada dengan perjalanan politik Indonesia dalam hal ini orang nomor satu di Republik ini yaitu Presiden Jokowi memakai gaya blusukan dalam kepemimpinannya, berkeliling dari pemukiman ke pemukiman lain, jalan dari kampung ke kampung, desa ke desa, jalanan berbatu sampai berlumpur hingga melewati gang-gang sempit dalam maupun luar kota. Jokowi bertemu, mendengar dan melihat langsung keluhan, keinginan dan aspirasai warganya. Bahkan pengawasan mendadak langsung pada sejumlah bawahan, kelurahan, kecamatan, sampai kantor walikota langsung didatangi. Gaya kepemimpinan seperti ini sukses mengambil hati dan simpati rakyat Indonesia yang membuat Jokowi

Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab – Sehan Rifky, Masduki Duryat, Savitri Tungga Saddami

berhasil meraih kemenangan 2 periode dan mempunyai power di kalangan elite (Duryat 2022).

Dalam Islam diajarkan berbagai Ilmu dan strategi, banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang sukses dalam berbagai bidang maka dari itu kita sebagai penerus bangsa dan agama harus banyak mempelajari sejarah Islam, strategi, pemikiran dan kepemimpinan.

Kesimpulan

Sebagai penutup, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Umar memiliki karakteristik kepemimpinan berbeda dari khalifah yang lain. Banyak lembaga-lembaga dan kebijakan sosial-politik yang dicetuskan oleh Umar menjadikannya sebagai seorang manajer yang sukses dalam memimpin negara. Keputusan penting yang diambilnya antara lain berkenaan dengan bagaimana cara menyikapi takdir, memastikan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, memberantas kezaliman, memberikan hak orang lain, membuktikan bahwa Islam itu agama damai, pelaksanaan hukuman yang adil dan tegas, dan bagaimana memutuskan dan memilih taktik dalam berperang. Sedangkan kecerdasan Umar dalam berbagai aktifitasnya sebagian di antaranya berkenaan dengan taktik dan strategi berperang termasuk di antaranya etika berperang, perlakuan terhadap tawanan perang, dan pengelolaan harta rampasan perang. Jasa lain dari Umar yang tidak dapat dilupakan berkisar pada penanggalan hijriyah, administrasi pemerintahan, dan ijtihad terhadap salat tarawih yang dilakukan secara berjamaah. Model Kepemimpinannya adalah *otoritas karismatik* dan *legal rasional*, diangkat oleh *khalifah* Abu Bakar Ash Shiddiq setelah dimusyawarahkan dengan sahabat yang lain dan dibai'at langsung oleh rakyat.

Umar bin Khattab mengelola pemerintahan berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW, yang berprinsip pada: *Pertama, syura* (musyawarah), dengan demikian, kepemimpinan dan kebijakan politik Umar bin Khattab tergolong kepemimpinan profetik. *Kedua*, Keadilan, Umar Bin Khattab mengelola Pendidikan umat sebagai tolak ukur kemajuan dan peradaban sebuah kepemimpinan atau pemerintahan.

Dalam konteks pemimpin lokal yaitu Indonesia, Presiden Jokowi telah sukses mengaplikasikan strategi Umar dalam hal "blusukan" ke masyarakat serta meraih simpati

dan hati rakyat, pemantauan pada lembaga-lembaga elite politik serta banyaknya OTT yang diterjadi pada masa kepemimpinanya.

Daftar Pustaka

- Al-Azami, Muhammad Mustafa. n.d. "The History Of The Qur'anic Text From Revelation To Compilation (A Comparative Study With The Old And New Testaments)." *UK ISLAMIC ACADEMY LEICESTER*, 37 and 38.
- Al-Qudsy, Sharifah Hayaati Syed Ismail, and Asmak Ab Rahman. 2011. "Effective Governance in the Era of Caliphate `Umar Ibn Al-Khattab (634-644)." *European Journal of Social Sciences* 18 (4): 620.
- Ali, K. 2000. *Study of Islamic History*. Edited by A Ghufron. Jakarta: RajaGrafindo.
- Arfah, Tina, and Putri Jamilah. 2021. "Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab." *Jurnal Islamika* 4 (1): 25–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2506>.
- Azhary, M. T. 2007. Ry, M. T. (2007). *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Kencana. Kencana.
- Duryat, Masduki. 2022. *Analisis Kebijakan Pendidikan ; Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: K-Media. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=nyedEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA74&ots=KyOvm5TxBZ&sig=Otwns28Nf7MMQXsxtjzusNU_eoA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Effendy, Bahtiar. 1988. *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Firdaus, Dwi Hidayatul. 2013. "Analisis Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Prespektif Bisnis Syariah." *Jurnal At-Tahzib* 1 (2): 268.
- Formanto, Bobby. 2020. "MODEL KEPEMIMPINAN ISLAMIS UMAR BIN ABDUL AZIZ DAN RELEVANSINYA DALAM EKONOMI SYARIAH." *Jurnal Al-Misbah* 1 (2): 179–89. <http://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/133/294>.
- Hamzani, Achmad Irwan, and Haavis Aravik. 2001. *Politik Islam (Sejarah Dan Pemikiran)*. Edited by Nur Khasanah. Pekalongan: NEM.
- Intihana, A. 2009. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Universitas Sriwijaya.
- Katimin. 2017. *POLITIK ISLAM Study Tentang Azas, Pemikiran, Dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam*. Medan: Perdana Publishing.
- Mahmudunnasir, Syed. 1981. *Islam It's Concepts & History*. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Marwa. 2018. "Marwah, Marwah. "UMAR BIN KHATTAB: Potret Keteladanan Sang Pemimpin Umat." *Jurnal Al-Tadabbur* 4 (2): 1–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46339/altadabbur.v4i2.92>.

**Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab – Sehan Rifky,
Masduki Duryat, Savitri Tungga Saddami**

- Nambo, A, and M Puluhuluwa. 2005. "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)." *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 21: 262–285.
- Pratama, M. Al Qautsar, and Budi Sujati. 2018. "Kepemimpinan Dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab." *Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 2 (1). <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.30829/j.v2i1.1496>.
- Qaradhawi, Yusuf Al. 2004. *Retorika Islam*. Jakarta: Khalifa.
- Ramlah. 2011. "Eksistensi Risalatul Qadha Umar Bin Khattab, Dan Relevansinya Dengan Peradilan Agama Di Indonesia Di Era Reformasi." *Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan* 4 (2): 107.
- Setiyowati, Asih, Cikal Jiwani Putri, Feni Miftakhul Jannah, and Muhammad Rizaludin As'ad. 2021. "Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib)." *YASIN: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya* 1 (2): 262–74. <https://doi.org/10.58578/yasin.v1i2.132>.